BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Auditing

Secara umum auditing sangat berkaitan erat dalam pengendalian internal perusahaan, auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan dan manajemen internal perusahaan, auditing juga menjadi sarana komunikasi tertulis yang menjelaskan kesimpulan mengenai reliabilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya.

Menurut Konrath (2002:5) mendefinisikan auditing sebagai "suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah di tetapkan dan mengkonsumsikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Alvin A.Arens, Marks S. Beasley dan Randal J.Elder (2011:4)"*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*".

Menurut Mulyadi (2010:9), auditing adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Menurut (Agoes dalam Sylvia, 2011) menyebutkan bahwa auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai laporan kewajaran laporan keuangan tersebut.

Sedangkan auditing menurut Whittington**,** O.Ray dan Kurt Panny, (2012:4) "*In a financial statement audit, the auditors undertake to gather evidence and provide a high level of assurance that the financial statement follow generally accepted accounting principles, or some other appropriate basis of accounting. An audit involves searching and verifying the accounting records and examining other evidence supporting the*

financial statements. By gathering information about the company and its environment, including internal control; inspection documents; observing assets; making inquiries within and outside the company; and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to issue and audit report. That audit report states that it is the auditors' opinion that the financial statements follow generally accepted accounting principles".

Menurut Agoes (2012:4) auditing adalah suatu pemeriksaan yang di lakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah di susun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses secara sistematis yang dilakukan oleh seseorang berkompeten untuk mendapatkan, mengumpulkan dan mengevaluasi suatu bukti tentang segala kegiatan ekonomi untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil tersebut kepada pihak yang berkepentingan guna untuk pengambilan suatu keputusan.

2.1.1.1 Tujuan Auditing

Menurut Abdul Halim (2008:135) tujuan auditing dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan spesifik. Tujuan umum audit adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasi dan menyusun sejumlah audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Sedangkan yang di maksud dengan tujuan spesifik adalah :

Di tentukan berdasarkan asersi-asersi yang di buat oleh manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan meliputi asersi-asersi manajemen baik yang bersifat eksplisit maupun implicit. Sedangkan berdasarkan Mulyadi (2010) menjelaskan tujuan audit yang bersifat umum dan khusus :

1. Tujuan umum audit

   Pada dasarnya tujuan audit umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini, auditor

perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup. Untuk menghimpun bukti kompeten yang cukup, auditor perlu mengidentifikasikan dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan. Dengan melihat tujuan audit spesifik tersebut, auditor akan dapat mengidentifikasikan bukti apa yang dapat di himpun dan bagaimana cara menghimpunbukti tersebut.

2. Tujuan audit khusus

   Tujuan audit khusus lebih di arahkan untuk pengujian terhadap pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan yang merupakan asersi manajemen.

   Setelah jelas mengenai gambaran umum audit, selanjutnya akan diuraikan tujuan audit berikut ini :

   a. Kelengkapan ***(Completeness)*** untuk meyakinkan seluruh peristiwa transaksi sudah dicatat, dan dalam jurnal secara actual telah dimasukkan.

   b. Ketepatan ***(Accurancy)*** untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan telah dicatat berdasarkan dengan jumlah, perhitungan, pengklasifikasian yang tepat.

   c. Eksistensi ***(Existence)*** guna memastikan bahwa semua harta (asset) dan kewajiban yang dicatat memiliki keterjadian pada waktu dan tanggal tertentu (tidak fiktif).

   d. Penilaian ***(Valuation)*** guna memastikan telah menerapkan prinsip-prinsip akutansi yang berlaku secara umum.

   e. Klasifikasi ***(classification)*** guna memastikan seluruh transaksi yang dicantumkan dalam jurnal di kelompokkan dengan tepat berdasarkan golongan akun yang tepat pula.

   f. Pisah batas ***(Cut-off)*** guna memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat dengan tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat, terkadang yang sesekali salah dalam pencatatan adalah transaksi yang mendekati akhir periode akuntansi.

   g. Pengungkapan ***(Disclosure)*** guna meyakinkan bahwa saldo Akun dan seluruh persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikandan dijelaskan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dalam isi catatan kaki laporan tersebut.

2.1.1.2 Jenis Audit

Jenis Audit umumnya dibagi menjadi 3(tiga) menurut Mulyadi (2002: 30) yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit).

Audit laporan keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen untuk menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Auditor menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan ini berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, kemudian melaporkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan audit.

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit).

   Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan dengan menilai kesesuaian antara peraturan atau kebijakan pada suatu organisasi dengan keadaan sebenarnya. Hasil dari audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai pada sektor pemerintahan.

3. Audit Operasional (Operational Audit).

   Audit operasional merupakan audit mengenai kegiatan organisasi atau bagian yang ada di dalamnya dan hubungannya dengan tujuan tertentu.Menilai apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sukrisno Agoes (2014) audit di bagi menjadi 4 jenis yaitu:

1. Management audit (operational audit)

   Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah di tentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah di lakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)

   Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang di tetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen, Dewan Komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain).

3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)

   Pemeriksaan yang di lakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah di tentukan.

4. Computer Audit

   Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing* (EDP) system.

2.1.2 Audit Manajemen

Audit manajemen sebagai suatu bektuk pemeriksaan yang bertujuan untuk meneliti dan menilai kinerja perusahaan yang di soroti dari sudut pandang peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja dalam berbagai komponennya (Siagian, 2001)**.** Menurut Arens dan Loebbecke (2003:12) Audit manajemen adalah evaluasi terhadap seluruh prosedur dan metode organisasi perusahaan, dalam tujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2009:46) menyatakan bahwa *management audit* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Menurut (IBK Bayangkara, 2015) audit manajemen (*management audit)* adalah evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan. Dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas, program-program yang di selenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa di audit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah di gunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah di rencanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah di tetapkan perusahaan.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa audit manajemen merupakan proses pengevaluasian manajemen suatu organisasi secara keseluruhan untuk menilai usur-unsur manajemen apakah telah direncanakan, dijalankan dan dikendalikan dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik dan benar sehingga organisasi melalui fungsi-fungsinya dapat mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien.

2.1.2.1 Tujuan Audit Manajemen

Menurut **Sukrisno Agoes** ***(2004:175)*** menyatakan bahwa tujuan *management audit* adalah sebagai berikut:

Tujuan dari *management audit* adalah:

a. Untuk menilai kinerja (*performance*) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan.

b. Untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, dan harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis.

c. Untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan (*objective*) yang telah ditetapkan oleh *top management.*

d. Untuk dapat memberikan rekomendasi kepada *top management* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian intern, sistem pengendalian manajemen, dan prosedur operasional perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas dari kegiatan operasi perusahaan."

Menurut (IBK Bayangkara, 2015:5) Audit Manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dengan rekomendasi yang di berikan nantinya dapat di capai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut.

2.1.2.2 Ruang Lingkup

Menurut (IBK Bayangkara, 2015:5) Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program/aktivitas yang di lakukan.

2.1.2.3 Sasaran Audit

Menurut (IBK Bayangkara, 2015:5) sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang di ketahui atau diidentifikasikan masih memerlukan perbaikan/peningkatan, baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas. Ada tiga elemen pokok dalam sasaran audit:

1. Kriteria (*criteria*)

   Kriteria merupakan standar (pedoman, norma) bagi setiap individu/kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya.

2. Penyebab (*cause*)

   Penyebab merupakan tindakan (aktivitas) yang di lakukan oleh setiap individu/kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif, program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif, program/aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih rendah dari standar yang telah di tetapkan.

3. Akibat (*effect*)

   Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program/aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang di tetapkan. Sementara akibat positif menunjukkan bahwa program/aktivitas telah terselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang di tetapkan.

2.1.2.4 Tahap-Tahap Audit

Menurut (IBK Bayangkara, 2015:11) ada beberapa tahapan yang harus di lakukan dalam audit manajemen. Secara garis besar tahapan-tahapan itu dapat di kelompokkan menjadi lima, yaitu audit pendahuluan;riview dan pengujian pengendalian manajemen;audit terinci, pelaporan, dan tindak lanjut.

1. Audit Pendahuluan

   Audit pendahuluan di lakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang di audit.Di samping itu, pada audit ini juga di lakukan penelaahan terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang di audit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah di peroleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang di audit.Dari informasi latar belakang ini, auditor dapat menentukan tujuan audit sementara (*tentative audit objective*). Dalam tahap audit ini auditor dapat menentukan beberapa tujuan audit sementara.

2. *Review* dan Pengujian Pengendalian Manajemen

   Pada tahapan ini auditor melakukan *review* dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit, dengan tujuan untuk menilai efektifitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan.Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit sehingga dengan lebih mudah dapat di ketahui potensi-potensi terjadinya kelemahan pada berbagai aktivitas yang di lakukan. Jika

di hubungkan dengan tujuan audit sementara yang telah di buat pada audit pendahuluan, hasil pengujian pengendalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit sesungguhnya (*definitive audit objective*) atau mungkin ada beberapa tujuan audit sementara yang gugur karena tidak cukup (sulit memperoleh) bukti-bukti untuk mendukung tujuan audit tersebut.

3. Audit Terinci

   Pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah di tentukan. Pada tahap ini juga di lakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan anatara satu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup relevan, dan kompeten dalam tahap ini di sajikan dalam suatu kertas kerja audit (KKA) untuk mendukung kesimpulan audit yang di buat dan rekomedasi yang di berikan.

4. Pelaporan

   Tahapan ini bertujuan untuk mengomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi yang di berikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen (objek audit) tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang di temukan. Laporan di sajikan dalam bentuk komprehensif (menyajikan temuan-temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi). Rekomendasi harus di sajikan dalam bahasa yang operasional dan mudah di mengerti serta menarik untuk di tindaklanjuti.

5. Tindak Lanjut

   Sebagai tahap akhir dari audit manajemen, tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut (perbaikan) sesuai dengan rekomendasi yang di berikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang di berikan. Oleh karena itu, rekomendasi di sajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindak perbaikan tersebut.

2.1.3 Efektifitas

Menurut Pandji Anoraga (2000:178) berpendapat bahwa apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang di rencanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut di katakana efektif. Efektifitas adalah suatu tindakan dimana tindakan itu akan efektif apabila telah mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Menurut Kurniawan (2005:109) "efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya".

Menurut Bhayangkara (2015:17) secara tingkat efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas serta fungsi dalam perusahaan sehingga dapat mencapai tingkat keberhasilan perusahaan.

2.1.4 Efisiensi

Menurut Kamus Besar Ekonomi (2003;178) menyatakan bahwa efisiensi adalah hubungan atau perbandingan antara faktor keluaran (output) barang dan jasa dengan masukan (input) yang langka di dalam suatu unit kerja, atau ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)."

Menurut Mulyadi (2007;63) mengemukakan bahwa efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan keuntungan."

Menurut Sedarmayanti (2014:22) Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat.

Menurut IBK. Bhayangkara (2015:16) efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan ukuran tingkat kemampuan ataupun proses kegiatan operasional perusahaan dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

2.1.5 Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Manajemen K3 adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang mana meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedural, proses, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian.

Tujuan ada manajemen keselamatan serta kesehatan kerja yaitu seperti berikut :

a. Terwujudnya suatu pekerjaaan yang lancar.
b. Terwujudnya tempat kerja yang aman.
c. Terwujudnya pekerjaan yang efektif dan produktif.
d. Situasi dan tempat yang terintegrasi dalam mencegah dan kurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
e. Tingkatkan situasi kesehatan kerja.
f. Mengurangi dan menghambat k3 dan tidak menyebabkan kerugian ekonomis.

2.1.6 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut (Sholiha dan Djohan, 2013:9) Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman dan tujuan akhirnya adalah mencapai produktivitas setinggi-tingginya. Menurut (IBK Bayangkara, 2015:146) Keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada kondisi fisisologis-fisik dan psikologis karyawan yang di akibatkan oleh lingkungan dan fasilitas kerja yang di sediakan perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja dengan baik secara signifikan dapat mencegah berbagai kecelakaan kerja atau penyakit tertentu pada karyawannya. Kondisi fisiologis-fisik merupakan berbagai akibat dalam bentuk penyakit, cedera, atau meninggal karena pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang kurang baik.

Berbagai penyakit yang di derita karyawan bisa terjadi karena lingkungan kerja yang kurang mendukung seperti sirkulasi udara yang tidak lancer, sanitasi yang tidak memadai, penerangan yang tidak mencukupi atau kebisingan yang berlebihan dan kondisi lingkungan kerja yang tidak menguntungkan lainnya. Berbagai kecelakaan kerja bisa terjadi karena kurangnya fasilitas atau instruksi keselamatan kerja yang seharusnya tersedia pada setiap fasilitas kerja ang di gunakan perusahaan. Selain akan menimbulkan biaya social yang tinggi, hal ini juga berakibat pada rendahnya produktifitas karyawan. Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja dapat berupa:

1. Kecelakaan kerja.

2. Penyakit yang di akibatkan oleh pekerjaan.
3. Kehidupan kerja yang berkualitas rendah.
4. Stress pekerjaan.
5. Kelelahan kerja.

Gangguan-gangguan di atas selain menyebabkan tidak tercapainya target produk dan layanan demi memenuhi kepuasan pelanggan, juga membuat perusahaan harus menanggung biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh sebab itu, perusahaan harus mengelola program keselamatan dan kesehatan kerja dengan sebaik-baiknya.Program keselamatan dan kesehatan kerja harus di kelola sebagai suatu strategi perusahaan untuk meningkatkan kualitas kerja.Maka sebelum program ini di tetapkan, perusahaan harus mengidentifikasi permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja untuk menentukan penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Setelah di ketahui penyebab permasalahannya, perusahaan dapat menjalankan beberapa program keselamatan dan kesehatan kerja secara terintregrasi agar dapat menekan kecelakaan dan sakitnya karyawan dalam bekerja.

Program-program tersebut dapat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemantuan Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

   Pemantuan ini bertujuan untuk menilai efektifitas program keselamatan dan kesehatan kerja yang di tetapkan perusahaan dalam menekan kecelakaan dan berbagai permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja lainnya. Untuk itu perusahaan harus memiliki dokumentasi yang memadai tentang pelaksanaan program tersebut mengenai hal-hal berikut.

   a. Tingkat insiden merupakan indeks keamanan industri yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam satu tahun.
   b. Frekuensi insiden menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam setiap satuan jam kerja tertentu.
   c. Tingkat emergency menggambarkan jam kerja yang hilang sebagai akibat dari terjadinya kecelakaan dan penyakit pada karyawan.
   d. Pengendalian kecelakaan merupakan bentuk pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan berbagai penyakit yang terjadi karena lingkungan kerja yang tidak sehat seperti :
      1) Menempatkan penjaga (rambu-rambu) di dekat mesin.
      2) Menyediakan pegangan pada tangga.

3) Kaca mata dan helm pelindung.
4) Lampu peringatan.
5) Fasilitas pengamanan pada peralatan yang berbahaya.
6) Penghentiaan pekerjaan secara otomatis.
7) Mekanisme perbaikan diri.

e. Ergonomis membuat pekerjaan menjadi lebih nyaman dan tidak melelahkan melalui penyesuaian kemampuan fisik dan fisiologis pekerja dengan lingkungan kerjanya.
f. Divisi keselamatan kerja yaitu pemanfaatan divisi keselamatan kerja dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan akibat buruk lainnya. Divisi ini bisa beranggotakan dari serikat pekerja dan departemen-departemen yang berkaitan dengan di koordinasikan oleh departemen SDM.
g. Pengubahan tingkah laku, pengubahan tingkah laku dalam bekerja juga efektif dalam mencegah kecelakaan kerja. Seperti di ketahui bahwa sebagian besar kecelakaan kerja terjadi karena kelalaian manusia (human error). Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, perilaku karyawan dalam bekerja harus di arahkan pada berbagai ketentuan yang sudah menjadi standar perusahaan dalam program keselamatan dan kesehatan kerjanya.
h. Mengurangi timbulnya penyakit, penyakit akibat kerja biasanya terjadi akibat lingkungan kerja yang kurang sehat. Lingkungan kerja yang kurang sehat meliputi sanitasi, sirkulasi udara, penerangan, kebisingan, dan pengelolahan limbah yang buruk dapat menyebabakan terjadinya berbagai penyakit bagi karyawan. Perusahaan harus menjadikan lingkungan kerja yang sehat sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan produktifitas karyawan.
i. Penyimpanan dokumen, dokumen tentang pengaruh berbagai bahan kimia yang di gunakan, jarak yang aman, pengaruh berbahaya bahan tersebut, dan penyakit yang bisa di timbulkan dalam lingkungan kerja, harus di simpan untuk memberikan informasi tentang ketaatan perusahaan dalam mengelola program keselamatan dan kesehatan kerjanya.
j. Memantau kontak langsung , mengendalikan kontak langsung karyawan dengan berbagai zat kimia dan bahan beracun lainnya sangat penting dalam program keselamatan dan kesehatan kerja. Di samping pencegahan kontak langsung, fasilitas keamanan seperti

masker, sarung tangan penutup kepala, dan seragam khusus harus tersedia jika kontak langsung harus terjadi.

2. Mengendalikan stress dan kelelahan kerja

   Berbagai tekanan yang di hadapi dalam menyelesaikan pekerjaan, hubungan kerja yang tidak harmonis dan tidak terpenuhinya kebutuhan karyawan dalam bekerja merupakan sumber-sumber stres yang di derita karyawan biasanya berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan, misalnya pelatihan dan penyegaran, maupun langkah berikut.

   a. Peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan

      Memberikan kesempatan yang lebih besar kepada karyawan dalam pengambilan keputusan, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan rencana yang di buatnya dapat menjadi motivasi intrinsik dan penghargaan yang sangat berarti dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat mengurangi tingkat stres yang di hadapi karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

   b. Strategi manajemen stres pribadi,

      beberapa hal yang sangat bermanfaat dalam startegi manajemen stres karyawan secara pribadi antara lain : manajemen waktu, pola makan yang sehat, olahraga teratur, serta ikut serta dalam kelompok sosial dan sebagainya.

3. Mengembangkan kebijakan kesehatan kerja

   Jika perusahaan semakin menyadari bahwa program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan secara terintegrasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan secara keseluruhan, maka semakin tinggi tingkat kepedulian perusahaan terhadap program tersebut. Berbagai program keselamatan dan kesehatan kerja di kembangkan dan di kelola secara serius untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan dan penyakit akibat buruknya lingkungan kerja. Perusahaan harus proaktif menangani permasalahan ini, bukan karena semata-mata demi memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

4. Menciptakan program kebugaran

   Lebih baik mencegah daripada mengobati. Hal ini menjadi dasar dari semakin pedulinya perusahaan dalam menjaga kesehatan karyawannya, daripada harus menolong mereka setelah sakit. Oleh karena itum semakin banyak klub-klub olahraga (kebugaran) di

bentuk di perusahaan, mulai dari yang paling sederhana (biaya murah) sampai dengan yang paling kompleks (memerlukan keterampilan dan biaya yang tinggi).

Standard Occupational Safety an Health Act (OSHA) yaitu Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Amerika Serikat mensyaratkan adanya peralatan perlindungan kerja pribadi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Persyaratan tersebut di sajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Persyaratan Utama untuk Perlindungan Kerja Pribadi

Persyaratan Utama untuk Peralatan Perlindungan Kerja Pribadi	
1.	Melakukan pengukuran bahaya dan pemilihan peralatan kerja
2.	Menginformasikan kepada seluruh karyawan mengenai bahaya dan jenis peralatan kerja yang akan di gunakan untuk melindungi dirinya
3.	Memastikan bahwa masing-masing karyawan di lengkapi dengan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja yang tepat
4.	Memverifikasi bahwa pengukuran terhadap bahaya di laksanakan melalui sertifikasi tertulis yang mengidentifikasikan tempat kerja dan orang-orang yang menyatakan bahwa pengukuran tersebut telah di lakukan
5.	Memastikan bahwa Personal Protective Equipment (PPE) yang rusak atau tidak efektif tidak boleh di gunakan dan menentukan tingkat "kerusakan/kekurangan" tersebut.
6.	Melatih para karyawan untuk mengetahui (minimal) hal-hal berikut: kapan PPE di perlukan, bagaimana cara yang benar untuk menyalakan, mematikan, menyesuaikan, dan menggunakan PPE ini
7.	Menguji karyawan agar dapat menunjukkan adanya pemahaman terhadap bahan pelatihan, serta kemampuan mereka untuk menggunakan PPE ini sebelum mereka di perbolehkan bekerja dengan menggunakan PPE. Pengusaha pertama kalinya harus mendefinisikan tujuan-tujuan pelatihan yang di perlukan di sini
8.	Melatih kembali para karyawan jika ada alasan yang kuat bahwa

	para karyawan ternyata tidak memiliki pemahaman dan ketrampilan yang di perlukan.
9.	Memverifikasikan bahwa masing-masing karyawan telah menerima dan memahami pelatihan yang di berikan melalui sertifikasi tertulis dengan menuliskan nama masing-masing karyawan yang di latih dan materi pelatihannya

2.1.6.1 Tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani tenaga kerja serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat.
2. Mencegah, dan mengobati kecelakaan yang di sebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja.
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang di timbulkan dari kerja.
4. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan.

Tujuan utama dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat kepada setiap karyawan serta untuk melindungi sumber daya manusianya. Menurut Mangkunegara dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikutip Indah Puji (2014), tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Agar setiap karyawan dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, social dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan secara selektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya.
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai.
5. Agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja.
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja.
7. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Secara umum dapat di simpulkan bahwa tujuan dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu :

1. Melindungi kesehatan, keamanan dan keselamatan dari tenaga kerja.
2. Meningkatkan efisiensi kerja.
3. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman.

2.1.7 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.7.1 Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Kepmenaker 05 tahun 1996, Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang di butuhkan bagi pengembangan , penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Menurut OHSAS (18001:2007) OHS *Management system; part of an organization's management system used to develop and implement its OH & S Policy and manage OH & S Risks. A management system is a set of interrelated elements used to establish policy and objectives and to achieve those objectives. A managements system includes organizational structure, planning activities (including for example, risk assessment and the setting of objectives), responsibilities, practices, procedures, process and resources*.Sistem Manajemen K3 merupakan konsep pengelolaan K3 secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan.

2.1.7.2 Sistem Manajemen K3 di Rumah Sakit

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di rumah sakit merupakan upaya untuk memberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitas. Manajemen K3 di rumah sakit adalah suatu proses kegiatan yang di mulai dengan tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang bertujuan untuk memberdayakan K3 di rumah sakit.

Tinjauan umum tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tidak terlepas dari pembahasan manajemen secara keseluruhan. Manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan secara efisien dan efektif melalui pengarahan, penggerakan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam suatu bentuk kerja. Sedangkan sistem manajemen merupakan rangkaian proses kegiatan manajemen yang teratur dan integrasi untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

2.1.7.3 Tujuan Penerapan Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit

Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi yang tidak membawa keselamatan kerja, atau perbuatan yang tidak selamat. Kecelakaan kerja dapat didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tujuan di terapkannya K3 Rumah Sakit adalah terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman , nyaman dan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan karyawan RS.Syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 (tiga). Pada pasal tersebut di sebutkan 18 (delapan belas) syarat penerapan keselamatan kerja di tempat kerja di antaranya sebagai berikut :

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
4. Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
5. Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
6. Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan dan getaran.
8. Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan.
9. Penerangan yang cukup dan sesuai.
10. Suhu dan kelembaban udara yang baik.
11. Menyediakan ventilasi yang cukup.

12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
13. Keserasian tenaga kerja, peralatan, lingkungan, cara dan proses kerja.
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman dan barang.
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
16. Mengamankan dan mempelancar bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
17. Mencegah terkena aliran listrik berbahaya.
18. Menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan dan pekerjaan yang resikonya bertambah tinggi.

2.1.7.4 Pedoman Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Rumah Sakit

Pedoman manajemen keselamatan dan kesehatan kerja menurut Peraturan Menteri Kesehatan 2007 meliputi langka-langkah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan (Komitmen dan Kebijakan)

   Komitmen di wujudkan dalam bentuk kebijakan (policy) tertulis, jelas dan mudah di mengerti serta di ketahui oleh seluruh karyawan rumah sakit. Manajemen rumah sakit mengidentifikasi dan menyediakan semua sumber daya esensial seperti pendanaan, tenaga K3 dan sarana untuk terlaksananya program K3 di rumah sakit. Kebijakan K3 di rumah sakit di wujudkan dalam bentuk wadah K3RS dalam struktur organisasi rumah sakit.

   Untuk melaksanakan komitmen dan kebijakan K3 rumah sakit, perlu di susun strategi antara lain :

   a. Advokasi sosialisasi program K3 rumah sakit.
   b. Menetapkan tujuan yang jelas.
   c. Organisasi dan penugasan yang jelas.
   d. Meningkatkan SDM profesional di bidang K3 rumah sakit pada setiap unit kerja di lingkungan rumah sakit.
   e. Sumber daya yang harus di dukung oleh manajemen puncak.
   f. Kajian risiko secara kualitatif dan kuantitatif.
   g. Membuat program kerja K3 rumah sakit yang mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan.
   h. Monitoring dan evaluasi secara internal dan eksternal secara berkala.

b. Tahap Perencanaan

Rumah sakit harus membuat perencanaan yang efektif agar tercapai keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan K3 di rumah sakit dapat mengacu pada standar sistem manajemen K3RS di antaranya *self-assessment* akreditasi K3 rumah sakit dan SMK3.

Perencanaan meliputi:

a. Identifikasi sumber bahaya dapat di lakukan dengan mempertimbangkan :
    1) Kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya.
    2) Jenis kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang mungkin terjadi.
    3) Membuat peraturan yaitu rumah sakit harus membuat, menetapkan dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan perturan, perundangan dan ketentuan mengenai K3 lainnya yang berlaku.
    4) Tujuan dan sasaran yaitu rumah sakit harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan, bahaya potensial dan risiko K3 yang bisa di ukur satuan/indikator pengukuran, sasaran pencapaian dan jangka waktu pencapaian.
b. Indikator kinerja, harus dapat di ukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian SMK3 rumah sakit.
c. Program kerja, yaitu rumah sakit harus menetapkan dan melaksanakan program K3 rumah sakit, untuk mencapai sasaran harus ada monitoring, evaluasi dan di catat serta di laporkan.

c. Pengorganisasian

Pelaksanaan K3RS sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan petugas, terhadap tugas dan kewajiban masing-masing serta kerjasama dalam pelaksanaan K3. Tanggung jawab ini harus di tanamkan melalui adanya aturan yang jelas. Pola pembagian tanggung jawab, penyuluhan kepada semua petugas, bimbingan dan latihan serta penegakan disiplin.Ketua organisasi/satuan pelaksana K3RS secara spesifik harus mempersiapkan data dan informasi pelaksanaan K3 di semua tempat kerja, merumuskan permasalahan serta menganalisis penyebab timbulnya masalah bersama unit-unit kerja, sehingga dapat di laksanakan dengan baik.

d. Tahap Penerapan atau Pelaksanaan

Pelaksanaan K3 harus merupakan bagian dari semua kegiatan operasional.Maka dari itu pekerjaan atau tugas apapun tidak dapat diselesaikan secara efisien kecuali si pekerja telah mengikuti setiap tindak pencegahan dan peraturan K3 untuk melindungi dirinya dan kawan kerjanya.

e. Tahap pengukuran dan evaluasi

Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi K3 di rumah sakit adalah salah satu fungsi manajemen K3 Rumah Sakit yang berupa suatu langkah yang di ambil untuk mengetahui dan menilai sampai sejauh mana proses kegiatan K3 rumah sakit itu berjalan dan mempertanyakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu kegiatan K3 rumah sakit dalam mencapai tujuan yang di tetapkan.

Pemantauan dan evaluasi yaitu pencatatan dan pelaporan K3 terintegrasi ke dalam sistem pelaporan RS (SPRS) meliputi:

a. Pencatatan dan pelaporan K3.
b. Pencatatan semua kegiatan K3.
c. Pencatatan dan pelaporan KAK.
d. Pencatatan dan pelaporan PAK.

2.1.7.5 Data Dan Indikator Keberhasilan K3 (*Output*)

Keberhasilan upaya K3 biasanya berupa output atau luaran dari upaya K3 yang di laksanakan, diukur dari beberapa indikator seperti berikut:

1. Kadar atau intensitas pajanan di lingkungan kerja di bawah Nilai Ambang Batas.
2. Kadar biomarker bahan kimia di bawah Indeks Pajanan Biologik.
3. Jumlah kunjungan pekerja ke poliklinik atau berobat jalan.
4. Jumlah pekerja yang di rawat di rumah sakit.
5. Biaya pengobatan dan perawatan.
6. Pola penyakit kerja, tren prevalensi dan insiden penyakit akibat kerja dan penyakit terkait kerja, cedera atau penyakit akibat kecelakaan kerja.
7. Tingkat kekerapan dan tingkat keparahan kejadian kecelakaan di tempat kerja
   a. Tingkat Kekerapan Kecelakaan (*Accident Frequency Rate*)

      Yaitu rata-rata jumlah kecelakaan dalam 1 periode di bandingkan dengan jumlah pekerja berisiko. Formula perhitungan *frequency rate* adalah sebagai berikut:

$$\textit{Frequency Rate} = \frac{\text{Jumlah kejadian kecelakaan dalam 1 periode X 100 \%}}{\text{Jumlah pekerja (populasi berisiko)}}$$

b. Tingkat Keparahan Kecelakaan (*Accident Severity Rate*)
Ialah rata rata jumlah hari sakit dalam waktu tertentu. Formula perhitungan severity rate adalah sebagai berikut :

$$\textit{Severity Rate} = \frac{\text{Jumlah hari hilang akibat kecelakaan X 1.000.000}}{\text{Jumlah hari kerja total + hari lembur}}$$

8. Tingkat kekerapan dan tingkat keparahan absenteisme
   a. Non effective Rate
      Yaitu rata-rata waktu kerja yang hilang, dalam satuan hari atau jam, di bandingkan dengan waktu kerja total. Formula perhitungannya seperti berikut :

$$\textit{Non Effective Rate} = \frac{\text{Hari hilang karena absen sakit X 100 \%}}{\text{Hari kerja total+hari lembur}}$$

   b. Frekuensi Rate Absensi Sakit (*Sickness Abcence Frequency*)
      Yaitu rata-rata jumlah insiden absensi (surat keterangan sakit) per orang atau jumlah spell dalam 1 periode di bandingkan dengan jumlah pekerja. Formula perhitungan frequency rate adalah sebagai berikut:

$$\textit{Frequency Rate} = \frac{\text{Jumlah } \textit{spell} \text{ dalam 1 periode X 100 \%}}{\text{Jumlah pekerja (populasi berisiko)}}$$

   c. Durasi absensi sakit (*Severity Rate* atau di sebut *Sickness Abcence Rate*) ialah rata-rata jumlah hari sakit dalam waktu tertentu. Formula perhitungannya yaitu :

$$\textit{Severity Rate} = \frac{\text{Jumlah hari hilang akibat absensi sakit X 100 \%}}{\text{(Jumlah hari kerja total X jumlah pekerja) + hari lembur}}$$

2.1.8 Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2.1.8.1 Pengertian Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Audit keselamatan dan kesehatan kerja termasuk bagian dari audit manajemen. Pada umumnya audit manajemen merupakan suatu bentuk pemeriksaan guna menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan, apakah telah berjalan secara efisien dan efektif serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian melaksanakan pengujian dan penelaan atas, ketidakefisienan, maupun ketidakefektifan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan perusahaan.

Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (1993) : "Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu sistem pengujian terhadap kegiatan operasi yang di lakukan secara kritis dan sistematis untuk menentukan kelemahan unsur sistem (manusia, sarana, lingkungan kerja dan perangkat lunak) sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan sebelum timbul kecelakaan atau kerugian ".

2.1.8.2 Tujuan Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (1993) tujuan dari audit keselamatan dan kesehatan kerja yaitu :

1. Untuk menilai potensi bahaya, gangguan kesehatan dan keselamatan.
2. Memastikan dan menilai pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja telah di laksanakan sesuai dengan ketentuan.
3. Menentukan langkah-langkah untuk mengendalikan bahaya potensial.
4. Perbaikan dan pencegahan di dasarkan atas temuan audit, identifikasi, penilaian resiko di rekomendasikan kepada manajemen puncak.
5. Menjamin kesesuaian dan keefektifan dalam pencapaian kebijakan dan tujuan.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. **Effendy, Saladdin Wirawan, (2014).**

   Penelitian dengan judul **"Audit Terhadap Sistem Manajemen K3 Berbasis Ohsas 18001 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung"** menerangkan hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem manajemen K3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung belum berjalan sesuai standar dari OHSAS 18001 atau dapat dikatakan masih sangat sedikit dalam kesesuaian dengan OHSAS 18001. Penerapannya

hanya sebatas dibuatnya prosedur-prosedur standar tetapi keterlaksanaan prosedur-prosedur tersebut tidak dilaksanakan atau dipantau keterlaksanaanya dengan baik.Sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung kurang serius dalam melaksanakan sistem manajemen K3 ini berbasis OHSAS 18001.

2. **Wahidin, Soedarmin Soenyoto, (2014).**

   Penelitian dengan judul "**Penerapan K3 Pada Pelaksanaan Proyek New Sfb Di Cikarang Yang Dilaksanakan Pt. Dwi Tunggal Surya Jaya**"menerangkan bahwapenerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pekerjaan beton, pemasangan rangka baja dan bata pada proyek New SFB oleh PT. Dwi Tunggal Surya Jaya di Kawasan Industri JABABEKA III Cikarang Bekasi belum mencapai 100%. Oleh karena itu penyedia jasa konstruksi dan tenaga kerja belum sepenuhnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek New SFB oleh PT. Dwi Tunggal Surya Jaya di Kawasan Industri JABABEKA III Cikarang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi dan tenaga kerja dalam pemasangan rangka baja mencapai 81,48 %, pekerjaan beton 78,81 %, dan pekerjaan pemasangan bata 74,43 %.Ketiga pekerjaan tersebut dikategorikan "pada umumnya". Dari hasil penelitian tentang penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan baja (81,48%), beton (78,81%) dan bata (74,43%) dari ketiga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperoleh rata- rata persentase sebesar 78,24 %. Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) Nomor PER.05/MEN/1996 tingkat pencapain penerapan Keselamatan danKesehatan Kerja dengan persentase 60-80 % diberikan sertifikat dan bendera perak, sehingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan baja, beton dan bata pada PT.Dwi Tunggal Surya Jaya masuk dalam kategori "menerima bendera perak".

3. **Andi Bungawati, (2011).**

   Penelitian dengan judul **"Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Petugas Penanganan Sampah Di Rumah Sakit Kota Palu"** bahwa Ketersediaan alat pelindung diri bagi responden di kota Palu, belum mencukupi baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Penggunaan alat pelindung diri bagi responden di Kota Palu, hanya sebagian kecil (25 %) Sebanyak 27 % responden bekerja dengan keamanan kerja yang kurang aman dan 11% responden pernah mengalami penyakit umum.Keselamatan kerja responden, 19% kurang baik dan 5% responden pernah mengalami kecelakaan akibat tertusuk/tergores benda tajam.

4. **Maddais, (2015).**

   Penelitian dengan judul "**Audit Manajemen atas pelaksanaan pemantauan program keselamatan dan kesehatan kerja karyawan pada PT Riau Sago Lestari, Jakarta**" bahwa PT Riau Sago Lestari belum sepenuhnya menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kerja menurut peraturan Permenaker No. 05/MEN/1996 dan OHSAS 18001 dalam membentuk manajemen yang menangani secara khusus tentang keselamatan kesehatan kerja.

5. **Riestiany Rini, (2010).**

   Penelitian dengan judul "**Analisis Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan**" menerangkan bahwa PT ITP telah menerapkan SMK3 berdasarkan standar OHSAS 18001 dan Permenaker No. 05/MEN/1996.Pelaksanaan SMK3 di P-11 tela berjalan dengan baik dan efektif mengurangi angka kecelakaan kerja, terutama dengan penggunaan APD. Hal ini menunjukkan bahwa P-11 telah beroperasi secara efektif dan efisien. Tingkat keseringan kecelakaan IFR secara nyata mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan -0,286 dan berpengaruh negatif, sehingga dapat dikatakan semakin kecil tingkat frekuensi kecelakaan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas kerja karyawan PT ITP.

6. **Ajeng Retno Yunita, Ayun Sriatmi, Eka Yunila Fatmasari, (2016).**

   Penelitian dengan judul "**Analisis Faktor-Faktor Kebijakan Dalam Implementasi Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3rs) Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang"** menjelaskan bahwa pengetahuan tentang isi program K3RS belum semua petugas kesehatan mengetahui dan mengerti tentang content isi dari program K3RS.Komitmen dari petugas kesehatan masih kurang, karena masih ada beberapa petugas kesehatan yang belum menerapkan program K3RS dengan baik walaupun sudah ada kebijakannya secara tertulis dan sudah di tanda tangani oleh Direktur RS.

7. **Ariany Frederika, Ari Sanjaya, I.A. Putu Mega Prabawati (2015).**

   Penelitian dengan judul **"Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)Pada Proyek Pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta"** disimpulkan bahwa persentase penerapan K3 dengan menggunakan OHSAS pada proyek pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta sebesar 73,37% dengan kategori baik (61%-80%).Dari hasil analisis faktor diperoleh bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh dalam penerapan K3 dengan menggunakan OHSAS pada proyek pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta adalah faktor Implementasi dan Operasi,

dengan bobot faktor sebesar 0,929 dan persentase komunalitas 86,20%, dengan variabel terkuat pada elemen ini adalah Pemeliharaan prosedur untuk membina kepedulian tentang K3. Sedangkan faktor yang paling lemah pengaruhnya dari semua elemen adalah Kebijakan K3, dengan bobot faktor 0,739 dan persentase komunalitas sebesar 54,60%, dengan variabel terkuat pada elemen ini adalah pendokumentasian kebijakan K3.

8. **Aryati Indah, (2017).**

   Penelitian dengan judul "**Evaluasi Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Bangunan Gedung Di Kabupaten Cirebon"** menerangkan bahwa Tingkat penerapan K3 pada aspek penggunaan alat pelindung diri (APD) adalah sebesar 60%. Tingkat penerapan K3 pada aspek pengelolan Kondisi darurat adalah sebesar 75%.Tingkat penerapan K3 pada aspek Pekerjaan Struktur, Perancah dan Tangga adalah sebesar 66,7%. Tingkat penerapan K3 pada aspek Penggunaan Bahan Beracun dan Berbahaya adalah sebesar 62,9%. Tingkat penerapan K3 pada aspek Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Kerja adalah sebesar 89,2%. Kendala penerapan K3 pada umumnya adalah keterbatasan anggaran, budaya pekerja yang belum terbiasa dengan penerapan K3 serta dampak penerapan terhadap biaya dan harga jual konstruksi properti. Terdapat perbedaan penerapan k3 berdasaran skala proyek. Rata-rata penerapan k3 lebih besar pada proyek skala besar dibandingkan proyek skala sedang dan kecil. Temuan ini dapat diisebebkkan karena efisensi biaya untuk menerapan dan risiko untuk tidak menerapkan k3 lebih besar pada proyek skala besar dibandingkan skala sedang dan proyek skala kecil.

9. **Ratih Ratna Sari, (2013).**

   Penelitian yang berjudul **"Penerapan Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Dalam Meminimalkan Kecelakaan Kerja Pada Pt. Waru Kaltim Plantation"** menerangkan bahwa Penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT. Waru Kaltim Plantation telah dapat meminimalkan kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2012, Terbukti pada tahun 2011 PT. Waru Kaltim Plantation mendapat *achievement level Environment, Healty &Safety: Blue* dari Astra International dan pada tahun 2012 PT. Waru KaltimPlantation mendapatkan penghargaan dari BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempun Dan Keluarga Berencana) terkait pelaksanaan perusahaan terbaik pembinaan tenaga kerja Perempuan. Kecelakaan kerja yang terjadi pada PT. Waru Kaltim Plantation disebabkan karena kurangnya sikap berdisiplin budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karyawan

dalam bekerja, kurangnya pengawasan dan perilaku yang tidak aman (*unsafe action*) dari karyawan itu sendiri.

10. **Lira Agushinta, Ratu Anggun Kusuma Wijaya, (2016).**

    Dalam penelitian dengan judul "**Pengaruh Penerapan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kecelakaan Kerja Karyawan**" menerangkan bahwa penerapan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yang dilaksanakan oleh PT. DHL *Exel Supply Chain* Indonesia (*kraft Project*) telah berjalan dengan baik.Walau begitu, ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian perusahaan, di antaranya adsalah kondisi kesehatan dan memberikan pemeriksaan berkala kepada karyawan agar mereka dapat berkerja dengan aman dan nyaman.Selain itu, dalam berkerja, karyawan harus selalu diingatkan untuk berlaku displin sesuai dengan standar peraturan perusahaan, dengan tujuan, agar tidak ada kecelakaan dalam berkerja serta, perusahaan dengan secara berkesinambungan terus meningkatkan pengawasan kepada karyawan agar mereka selalu berkerja sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja.

Tabel 2.2
Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Jurnal di muat	Hasil Penelitian
1.	Wahidin, Soedarmin Soenyoto	Jurnal Bentang Volume 2 Nomer 2, Juli 2014	Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam pekerjaan beton, pemasangan rangka baja dan bata pada proyek New SFB oleh PT. Dwi Tunggal Surya Jaya di Kawasan Industri JABABEKA III Cikarang Bekasi belum mencapai 100%. Oleh karena itu penyedia jasa konstruksi dan tenaga kerja belum sepenuhnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3)pada pekerjaan baja (81,48%), beton (78,81%) dan bata (74,43%) dari ketiga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperoleh rata- rata persentase sebesar 78,24 %.Menurut Peraturan Pemerintah Menteri Tenaga Kerja (Permennaker) Nomor PER.05/MEN/1996 tingkat pencapain penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan persentase 60-80 % diberikan sertifikat dan bendera perak, sehingga penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan baja, beton dan bata pada PT.Dwi Tunggal Surya Jaya masuk dalam kategori "menerima bendera perak".
2.	Andi Bungawati	Jurnal Promotif, Volume 1 Nomor 1, Oktober 2011	Ketersediaan alat pelindung diri bagi responden di kota Palu, belum mencukupi baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Penggunaan alat pelindung diri bagi responden di kota Palu, hanya sebagian kecil (25 %) Sebanyak 27 % responden bekerja dengan keamanan kerja yang kurang aman dan 11% responden pernah mengalami penyakit umum. Keselamatan kerja responden, 19% kurang baik dan 5% responden pernah mengalami kecelakaan akibat tertusuk/tergores benda tajam.
3.	Effendy ,	2014	hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan

	Saladdin Irawan		sistem manajemen K3 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung belum berjalan sesuai standar dari OHSAS 18001 atau dapat dikatakan masih sangat sedikit dalam kesesuaian dengan OHSAS 18001. Penerapannya hanya sebatas dibuatnya prosedur-prosedur standar tetapi keterlaksanaan prosedur-prosedur tersebut tidak dilaksanakan atau dipantau keterlaksanaanya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung kurang serius dalam melaksanakan sistem manajemen K3 ini berbasis OHSAS 18001.
4.	Ajeng Retno Yunita, Ayun Sriatmi, Eka Yunila Fatmasari	Jurnal Kesehatan Masyarakat volume 4 Nomor 2, April 2016	Pengetahuan tentang isi program K3RS belum semua petugas kesehatan mengetahui dan mengerti tentang content isi dari program K3RS. Komitmen dari petugas kesehatan masih kurang, karena masih ada beberapa petugas kesehatan yang belum menerapkan program K3RS dengan baik walaupun sudah ada kebijakannya secara tertulis dan sudah di tanda tangani oleh Direktur RS.
5.	Riestiany, Rini	2010	menerangkan bahwa PT ITP telah menerapkan SMK3 berdasarkan standar OHSAS 18001 dan Permenaker No. 05/MEN/1996. Pelaksanaan SMK3 di P-11 telah berjalan dengan baik dan efektif mengurangi angka kecelakaan kerja, terutama dengan penggunaan APD. Hal ini menunjukkan bahwa P-11 telah beroperasi secara efektif dan efisien. Tingkat keseringan kecelakaan IFR secara nyata mempengaruhi tingkat produktivitas kerja karyawan -0,286 dan berpengaruh negatif, sehingga dapat dikatakan semakin kecil tingkat frekuensi kecelakaan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas kerja karyawan PT ITP.
6.	Maddais	2015	PT Riau Sago Lestari belum sepenuhnya

			menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kerja menurut peraturan Permenaker No. 05/MEN/1996 dan OHSAS 18001 dalam membentuk manajemen yang menangani secara khusus tentang keselamatan kesehatan kerja.
7.	Lira Agushinta, Ratu Anggun Kusuma Wijaya	Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik Volume 2 Nomor 2 Januari 2016	Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan yang dilaksanakan oleh PT. DHL Exel Supply Chain Indonesia (kraft Project) telah berjalan dengan baik. Walau begitu, ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian perusahaan, di antaranya adsalah kondisi kesehatan dan memberikan pemeriksaan berkala kepada karyawan agar mereka dapat berkerja dengan aman dan nyaman. Selain itu, dalam berkerja, karyawan harus selalu diingatkan untuk berlaku displin sesuai dengan standar peraturan perusahaan, dengan tujuan, agar tidak ada kecelakaan dalam berkerja --- serta, perusahaan dengan secara berkesinambungan terus meningkatkan pengawasan kepada karyawan agar mereka selalu berkerja sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja.
8.	Aryati Indah	Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan Volume 19 Nomor 1, Januari 2017	Tingkat penerapan K3 pada aspek penggunaan alat pelindung diri (APD) adalah sebesar 60%. Tingkat penerapan K3 pada aspek pengelolan Kondisi darurat adalah sebesar 75%. Tingkat penerapan K3 pada aspek Pekerjaan Struktur, Perancah dan Tangga adalah sebesar 66,7%. Tingkat penerapan K3 pada aspek Penggunaan Bahan Beracun dan Berbahaya adalah sebesar 62,9%. Tingkat penerapan K3 pada aspek Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan Kerja adalah sebesar 89,2%. Kendala penerapan K3 pada umumnya adalah keterbatasan anggaran, budaya pekerja yang belum terbiasa dengan penerapan K3 serta dampak penerapan terhadap biaya dan harga jual konstruksi properti.

9.	Ariany Frederika, Ari Sanjaya, I.A. Putu Mega Prabawati	Jurnal Ilmiah Teknik Sipil Volume 19 Nomor 2 , Juli 2015	Persentase penerapan K3 dengan menggunakan OHSAS pada proyek pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta sebesar 73,37% dengan kategori baik (61%-80%)Dari hasil analisis faktor diperoleh bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh dalam penerapan K3 dengan menggunakan OHSAS pada proyek pembangunan Fave Hotel Kartika Plaza Kuta adalah faktor Implementasi dan Operasi, dengan bobot faktor sebesar 0,929 dan persentase komunalitas 86,20%, dengan variabel terkuat pada elemen ini adalah Pemeliharaan prosedur untuk membina kepedulian tentang K3. Sedangkan faktor yang paling lemah pengaruhnya dari semua elemen adalah Kebijakan K3, dengan bobot faktor 0,739 dan persentase komunalitas sebesar 54,60%, dengan variabel terkuat pada elemen ini adalah pendokumentasian kebijakan K3.
10.	Ratih Ratna Sari	Jurnal Administrasi Bisnis Volume 1 Nomor 3, 2013	Penerapan manajemen kesehatan dan keselamatan kerja pada PT. Waru Kaltim Plantation telah dapat meminimalkan kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2010 sampai 2012, Terbukti pada tahun 2011 PT. Waru Kaltim Plantation mendapat *achievement level Environment, Healty &Safety: Blue* dari Astra International dan pada tahun 2012 PT. Waru KaltimPlantation mendapatkan penghargaan dari BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempun Dan Keluarga Berencana) terkait pelaksanaan perusahaan terbaik pembinaan tenaga kerja Perempuan. Kecelakaan kerja yang terjadi pada PT. Waru Kaltim Plantation disebabkan karena kurangnya sikap berdisiplin budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) karyawan dalam bekerja, kurangnya pengawasan dan perilaku yang tidak aman (unsafe action) dari karyawan itu sendiri.